

A B S T R A K

DPRD berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan daerah. Dalam menjalankan fungsi perundangan tersebut DPRD bersama-sama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, DPRD diberi hak prakarsa, dengan hak prakarsa tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dapat dibuat oleh DPRD. Undang-undang dan tata tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa dan mekanisme usul prakarsa atas rancangan peraturan daerah, akan tetapi berbagai kendala yang dimiliki anggota DPRD antara lain tingkat pendidikan, pengalaman, organisasi, minat terhadap informasi, komunikasi menyebabkan anggota DPRD kurang mampu menggunakan prakarsa.

Dari latar belakang tersebut penelitian ini menguji pengaruh tingkat pendidikan anggota DPRD, pengalaman organisasi, minat anggota DPRD terhadap informasi, komunikasi DPRD dengan pihak lain, tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap penggunaan prakarsa. Penelitian ini mengambil sampel 45 orang anggota DPRD di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan 45 orang anggota DPRD dari Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Dari 90 orang responden tersebut di dua daerah penelitian dilihat dari komposisi anggota DPRD dari segi tingkat pendidikan dan tingkat pemenuhan kebutuhan di dua daerah penelitian menunjukkan tidak ada beda sedangkan pengalaman organisasi, minat terhadap informasi, komunikasi anggota DPRD menunjukkan ada beda namun penggunaan prakarsa sama-sama tinggi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD pengalaman organisasi, minat anggota terhadap informasi, komunikasi anggota DPRD dengan pihak lain berpengaruh terhadap penggunaan prakarsa. Hal ini dapat diinterpretasikan anggota DPRD dalam menggunakan prakarsa diatur dengan peraturan tata tertib DPRD. Untuk melaksanakan fungsi sebagai pembuat kebijakan masing-masing anggota mengerahkan sumber daya yang mereka punyai yaitu pendidikan, pengalaman organisasi, minat terhadap informasi, komunikasi. Upaya pengerahan sumber daya tersebut membutuhkan keterampilan khusus dan hanya anggota DPRD yang memiliki pengetahuan tentang kemasyarakatan yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman organisasi di mana ia terlibat secara aktif, dari informasi melalui media maupun lembaga, komunikasi dengan pihak lain. Di samping itu dalam menggunakan prakarsa anggota DPRD dipengaruhi dan tidak dipengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan anggota DPRD mengingat kebutuhan setiap orang berbeda hanya kebutuhan manusia yang belum terpenuhi mengendalikan perilaku seseorang. Walaupun peraturan tata tertib DPRD membatasi aktivitas anggota DPRD dalam menggunakan hak prakarsa, namun apabila sistem memberikan peluang, ruang dan waktu mendukung, maka DPRD dapat melaksanakan fungsi legislatif khususnya dalam menggunakan hak prakarsa di tengah-tengah kendala struktur yang ada.

A B S T R A C T

DPRD (Regional Parliament) is function as a body of regional policy maker. In executing the legislative function, DPRD along with District Heads compile and determine regional regulations. To be able to execute the function, DPRD has been given initiative right used to make regional regulation draft. DPRD laws and disciplines have regulated the right and proposing mechanism of initiative on regional regulation draft but there are various obstacles faced by DPRD members namely their education level, experience, organization, interest of information, and communication which make them not capable enough to use the initiative.

Based on the background mentioned, this research is meant to examine the influence of the education level of DPRD members, organization experience, the information interest of DPRD members, DPRD communication with other people, and the level of the fulfillment need for the usage of initiative. The samples of this research are 45 DPRD members in Kotamadya Daerah tingkat II and 45 DPRD members in Kabupaten Daerah tingkat II Banyuwangi. From 90 respondents viewed from the composition of DPRD members based on their education level and their need fulfillment level in both research areas, the research shows that there is no difference in both levels while the organization experience, information interest, and communication of DPRD members indicate that there is difference but the usage of initiative in all levels is high. The findings of this research indicated that the education level, organization experience, information interest of DPRD members and their communication with other people influence the usage of initiative it can be interpreted that DPRD members in using the initiative are regulated by the regulation of DPRD disciplines.

In carrying out their function as a regional policy maker, every member uses his resources namely education, organization experience, information interest and communication to the utmost. The effort of using the resources need special skills and only DPRD members have the social knowledge obtained from education and organization experience in which they have actively involved, and information obtained either from media or institutions also communication with other people are able to make them use the initiative. Besides, considering the fact that everyone's need is different, in using the initiative DPRD members are influenced by the level of the need fulfillment of DPRD members and only unfulfilled human need controls someone's behavior.

Although DPRD discipline regulations restrict the activity of DPRD members in using their initiative right, but when the political system gives a possibility, space and time that support the right usage, DPRD is able to carry out the legislative function well especially in carrying out the initiative rights among the existing obstacles.

Key word : a body regional parliament behavior, make initiative rights.